

# PERAN PEMERINTAH KAMPUNG INTU LINGAU DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS PEMBANTU KAMPUNG INTU LINGAU KECAMATAN NYUATAN KABUPATEN KUTAI BARAT

Julio Ica<sup>1</sup>, Yahdi Qolbi<sup>2</sup>

## *Abstrak*

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan upaya yang dijalankan oleh Pemerintah kampung Intu Lingau dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas Pembantu Kampung Intu Lingau. Metode penelitian yang dipergunakan pada penelitian ini adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kampung Intu Lingau berperan aktif dan berkomitmen tinggi dalam pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat melalui penyediaan layanan dasar seperti Posyandu, fokus pada pencegahan dan penanganan stunting dengan pemanfaatan dana desa, serta pemberdayaan kader kesehatan untuk menjangkau wilayah yang belum memiliki fasilitas kesehatan memadai. Meskipun demikian, pelayanan kesehatan masih menghadapi tantangan pada aspek sosial dan kualitas sumber daya manusia, seperti rendahnya kesadaran masyarakat terkait pernikahan dini dan pola hidup sehat serta keterbatasan sarana medis dan tenaga kesehatan, sehingga diperlukan kolaborasi lintas pihak dan penguatan upaya penyuluhan guna meningkatkan efektivitas pelayanan kesehatan secara berkelanjutan.*

**Kata Kunci:** pemerintah desa, pelayanan kesehatan dan kinerja pegawai

## **Pendahuluan**

Pelayanan kesehatan merupakan hak dasar masyarakat yang dijamin oleh negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas hingga ke wilayah pedesaan dan kampung. Dalam sistem pemerintahan daerah, pemerintah kampung memiliki tanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk pelayanan kesehatan.

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Pemerintahan Integratif, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email : juullioo098@gmail.com

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

Kampung Intu Lingau yang berada di Kecamatan Nyuatan Kabupaten Kutai Barat memiliki Puskesmas Pembantu sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. Keberadaan Pustu menjadi penting dalam memberikan akses pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat, seperti pemeriksaan kesehatan, pelayanan ibu dan anak, imunisasi, serta penanganan penyakit ringan.

Namun dalam pelaksanaannya, pelayanan kesehatan di tingkat kampung masih menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan fasilitas, kurangnya tenaga kesehatan, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana peran Pemerintah Kampung Intu Lingau dalam meningkatkan pelayanan kesehatan serta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya.

### **Kerangka Dasar Teori** ***Pemerintah Desa***

Pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam rangka mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ali & Saputra, 2020). Menurut Simbolon et al. (2021), pemerintah desa memiliki enam fungsi utama, yaitu menyelenggarakan urusan rumah tangga desa, melaksanakan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, membina perekonomian desa, meningkatkan partisipasi dan swadaya masyarakat, menjaga ketenteraman dan ketertiban, serta menyelesaikan perselisihan melalui musyawarah. Maga et al. (2017) menjelaskan bahwa pemerintah desa bertanggung jawab menyelenggarakan administrasi pemerintahan secara efektif, transparan, dan akuntabel guna mewujudkan pelayanan publik yang optimal. Selain itu, Sugiman (2018) dalam Hajar et al. (2022) menyatakan bahwa pemerintah desa merupakan lembaga pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat sehingga memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup, serta keberhasilan pembangunan desa.

### ***Pelayanan Kesehatan***

Pelayanan kesehatan merupakan segala upaya yang diselenggarakan secara mandiri maupun bersama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah serta mengobati penyakit, dan memulihkan kesehatan individu, keluarga, kelompok, maupun masyarakat (Depkes RI, 2009 dalam Handayani Sri, 2016). Sejalan dengan itu, Asrul Aswar dalam Sondakh et al. (2023) menyatakan bahwa pelayanan kesehatan adalah berbagai upaya kolektif

yang dilakukan dalam suatu organisasi dengan tujuan menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pelayanan kesehatan juga merupakan bagian dari industri jasa yang berfokus pada kualitas layanan dan kepuasan pasien, bukan semata-mata berorientasi pada keuntungan (Ramadhani & Hermana, 2023).

## **Kinerja Pegawai**

### ***Definisi Kinerja***

Menurut Moehariono dalam Setyaningrum dan Rihandoyo (2016), kinerja atau *performance* merupakan gambaran mengenai tingkat keberhasilan suatu program atau kegiatan dalam mencapai sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang telah dirancang melalui perencanaan strategis. Kinerja menunjukkan sejauh mana pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Rummler dan Brache dalam Setyaningrum dan Rihandoyo (2016) menjelaskan bahwa kinerja dapat dilihat dari tiga tingkatan, yaitu kinerja organisasi, kinerja proses, dan kinerja individu. Kinerja organisasi berkaitan dengan pencapaian tujuan dan efektivitas pengelolaan organisasi secara keseluruhan. Kinerja proses mengacu pada keberhasilan pelaksanaan kegiatan atau pelayanan dalam menghasilkan produk atau jasa. Sedangkan kinerja individu merupakan hasil kerja yang dicapai oleh pegawai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

### ***Definisi Kinerja Pegawai***

Menurut Kusriyanto dalam Setyaningrum dan Rihandoyo (2016), kinerja pegawai adalah perbandingan antara hasil kerja yang diperoleh dengan tenaga serta waktu yang digunakan dalam menyelesaikan tugas. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja tidak hanya dilihat dari hasil akhir, tetapi juga dari efisiensi dalam pelaksanaannya.

Stajkovic, Bandura, dan Locke dalam Setyaningrum dan Rihandoyo (2016) menyatakan bahwa peningkatan kinerja pegawai dapat dilakukan melalui pemberian deskripsi tugas yang jelas, penjelasan mengenai keterampilan teknis yang dibutuhkan, serta penciptaan lingkungan kerja yang kondusif dan didukung pelatihan yang memadai.

### ***Penilaian Kinerja Pegawai***

Menurut Andrew E. Sikula dalam Setyaningrum dan Rihandoyo (2016), penilaian kinerja pegawai merupakan proses evaluasi yang dilakukan secara sistematis terhadap hasil pekerjaan pegawai. Penilaian ini mencakup aspek kuantitas kerja, kualitas hasil kerja, tingkat pengetahuan dan pemahaman terhadap tugas (job knowledge), serta pemanfaatan waktu kerja yang meliputi disiplin dan efektivitas penggunaan waktu.

### ***Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pegawai***

Menurut Wirawan dalam Setyaningrum dan Rihandoyo (2016), kinerja pegawai dipengaruhi oleh faktor internal pegawai, lingkungan internal organisasi, dan lingkungan eksternal organisasi. Faktor internal meliputi bakat, pengetahuan, keterampilan, pengalaman, serta kondisi fisik dan psikologis. Lingkungan internal organisasi mencakup kepemimpinan, budaya organisasi, sistem manajemen, kompensasi, serta iklim kerja. Sedangkan faktor eksternal meliputi kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang dapat memengaruhi kinerja pegawai.

Setyaningrum dan Rihandoyo (2016) menambahkan bahwa lingkungan fisik kerja, ketersediaan peralatan, kejelasan pekerjaan, umpan balik, sistem penghargaan, standar prosedur operasi, pengetahuan, serta keterampilan dan sikap pegawai juga turut menentukan tingkat kinerja. Dale Timple dalam Setyaningrum dan Rihandoyo (2016) secara sederhana mengelompokkan faktor tersebut menjadi faktor internal dan faktor eksternal.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif bertujuan untuk memahami dan menggambarkan secara mendalam fenomena sosial melalui data berbentuk narasi yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Menurut Wahidmurni (2017), penelitian kualitatif digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian melalui data deskriptif yang menggambarkan realitas sosial secara mendalam. Penelitian ini berlandaskan pada pandangan konstruktivisme yang memandang kenyataan sebagai hasil interaksi sosial dan dapat dimaknai secara berbeda oleh setiap individu. Fokus penelitian diarahkan pada Peran Pemerintah Kampung dalam Meningkatkan Pelayanan Kesehatan di Kampung Intu Lingau Kecamatan Nyuatan Kabupaten Kutai Barat, yang meliputi pengelolaan pelayanan kesehatan, upaya peningkatan akses layanan, serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian dilaksanakan di Kampung Intu Lingau Kecamatan Nyuatan Kabupaten Kutai Barat pada bulan Februari hingga Mei 2025.

Informan penelitian ditentukan melalui teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Informan terdiri dari Kepala Kampung, Bidan Kampung, dan empat orang masyarakat Kampung Intu Lingau. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi lapangan untuk memperoleh informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang dilakukan secara terus-menerus sejak pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh diseleksi, disusun secara sistematis, kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif untuk menghasilkan kesimpulan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

## **Hasil dan Pembahasan**

### ***Peran Pemerintah Kampung Dalam Pengelolaan Pelayanan Kesehatan***

Peran pemerintah kampung dalam pengelolaan pelayanan kesehatan di Kampung Intu Lingau menunjukkan adanya keterlibatan yang cukup aktif dalam berbagai tahapan kegiatan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan program-program kesehatan masyarakat. Dalam tahap perencanaan, pemerintah kampung berupaya mengidentifikasi kebutuhan kesehatan masyarakat serta merumuskan program yang sesuai dengan kondisi dan permasalahan kesehatan yang ada di lingkungan kampung. Perencanaan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan masukan dari masyarakat, tenaga kesehatan, serta pihak terkait lainnya agar program yang dijalankan benar-benar tepat sasaran. Selain itu, dalam tahap pelaksanaan, pemerintah kampung berperan tidak hanya sebagai pihak yang menjalankan fungsi administratif, tetapi juga sebagai fasilitator dan penggerak kegiatan kesehatan berbasis komunitas. Pemerintah kampung memberikan dukungan terhadap berbagai kegiatan kesehatan seperti penyelenggaraan posyandu, penyuluhan kesehatan, serta kegiatan pencegahan penyakit yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Dukungan tersebut dapat berupa penyediaan sarana dan prasarana, alokasi anggaran dari dana kampung, maupun koordinasi dengan tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah tersebut. Lebih lanjut, pemerintah kampung juga menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program kesehatan agar kegiatan yang dilakukan dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Pengawasan ini dilakukan dengan memantau jalannya kegiatan kesehatan, mengevaluasi hasil yang telah dicapai, serta memastikan bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat kampung. Dengan adanya pengawasan yang baik, pemerintah kampung dapat mengetahui kendala yang muncul di lapangan dan segera mengambil langkah perbaikan. Berdasarkan hasil penelitian, peran pemerintah kampung tersebut terlihat dari adanya upaya dalam menyediakan layanan kesehatan yang memadai serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan mereka. Pemerintah kampung juga berupaya memberdayakan masyarakat melalui pembinaan kader kesehatan dan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat. Melalui kerja sama antara pemerintah kampung, tenaga kesehatan, dan masyarakat, pengelolaan pelayanan kesehatan di Kampung Intu Lingau dapat berjalan dengan lebih efektif dan memberikan manfaat yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

### ***Penyediaan Layanan Kesehatan Yang Memadai***

Penyediaan layanan kesehatan di Kampung Intu Lingau difokuskan pada pelayanan kesehatan dasar melalui kegiatan Posyandu yang menjangkau berbagai kelompok usia, mulai dari balita, remaja, hingga lansia. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pemerintah kampung berupaya menerapkan pelayanan kesehatan yang bersifat menyeluruh dan berkelanjutan. Program pencegahan dan penanganan stunting menjadi perhatian utama pemerintah kampung. Berdasarkan data tingkat kabupaten, kasus stunting masih bersifat fluktuatif dan belum

menunjukkan penurunan yang stabil. Kondisi tersebut menegaskan bahwa permasalahan stunting masih menjadi isu strategis yang membutuhkan intervensi berkelanjutan. Pemerintah Kampung Intu Lingau merespons permasalahan ini dengan mengalokasikan dana desa untuk pemberian makanan tambahan, penyediaan obat-obatan, serta rujukan anak stunting ke fasilitas kesehatan lanjutan.

Selain itu, keberadaan Puskesmas Pembantu sebagai fasilitas milik Dinas Kesehatan serta dukungan kader kesehatan memperkuat sistem pelayanan di tingkat kampung. Walaupun cakupan layanan masih terbatas pada pelayanan kesehatan dasar, sinergi antara pemerintah kampung, tenaga kesehatan, dan kader menunjukkan adanya model pelayanan berbasis komunitas yang cukup efektif. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah kampung dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat meskipun dengan keterbatasan sumber daya.

### ***Pemberdayaan Masyarakat Dalam Menjaga Kesehatan***

Pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui penguatan peran kader kesehatan seperti kader Posyandu, Posbindu, dan Posyandu Lansia. Pemerintah kampung memberikan insentif kepada para kader sebagai bentuk dukungan dan apresiasi atas kontribusi mereka dalam pelayanan kesehatan di tingkat kampung. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pemerintah kampung tidak hanya berfokus pada penyediaan layanan kesehatan, tetapi juga mendorong partisipasi aktif masyarakat. Kader kesehatan berperan sebagai ujung tombak dalam memberikan edukasi, melakukan pendataan, pemantauan kesehatan, serta mengajak masyarakat untuk mengikuti kegiatan pelayanan rutin.

Pemberian insentif terbukti meningkatkan motivasi kader dan memperlancar pelaksanaan kegiatan kesehatan. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat di Kampung Intu Lingau telah mengarah pada pendekatan partisipatif, di mana masyarakat tidak hanya menjadi penerima layanan, tetapi juga turut berperan aktif dalam menjaga kesehatan lingkungan dan keluarga.

### ***Upaya Pemerintah Kampung Untuk Meningkatkan Akses Kesehatan***

Upaya pemerintah kampung dalam meningkatkan akses kesehatan dilakukan melalui pelaksanaan program yang inklusif serta pengelolaan anggaran yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

### ***Program***

Program Salah satu program utama yang dijalankan adalah bantuan pengurusan BPJS Kesehatan bagi masyarakat kurang mampu. Pemerintah kampung secara aktif membantu proses administrasi agar warga, khususnya kelompok miskin, dapat memperoleh jaminan kesehatan tanpa hambatan biaya maupun birokrasi.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar warga Kampung Intu Lingau memperoleh BPJS melalui fasilitasi pemerintah kampung. Program ini

memperlihatkan peran pemerintah kampung sebagai penghubung antara masyarakat dan sistem jaminan kesehatan nasional. Kebijakan tersebut mendukung prinsip pemerataan layanan kesehatan dan memperkuat fungsi pemerintah kampung sebagai pelaksana pelayanan dasar yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

### ***Anggaran***

Dalam aspek anggaran, pemerintah kampung mengalokasikan dana desa secara khusus untuk sektor kesehatan. Alokasi tersebut mencakup penanganan stunting sebesar Rp55 juta sebagai respons terhadap ditemukannya sejumlah anak yang mengalami stunting.

Selain penanganan stunting, anggaran juga digunakan untuk pemberian insentif kader kesehatan, penyediaan dana operasional Posyandu dan Posbindu, pengadaan alat pemeriksaan kesehatan seperti alat tes kolesterol dan tekanan darah, serta pemberian vitamin dan suplemen bagi lansia. Pengalokasian anggaran ini menunjukkan adanya perencanaan yang berbasis kebutuhan riil masyarakat. Dari perspektif kebijakan publik, langkah tersebut mencerminkan pemenuhan aspek input dalam manajemen program kesehatan, sekaligus menunjukkan orientasi pelayanan yang inklusif dan berkeadilan sosial.

### ***Hambatan Yang Dihadapi Pemerintah Kampung Dalam Pelayanan Kesehatan***

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, pemerintah kampung masih menghadapi sejumlah hambatan yang memengaruhi efektivitas pelayanan kesehatan, yaitu antara lain :

#### ***Hambatan Dari Masyarakat***

Hambatan utama berasal dari rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan. Pernikahan usia dini menjadi salah satu faktor yang berdampak langsung terhadap kesehatan ibu dan anak serta berkontribusi pada kasus stunting. Kurangnya pemahaman mengenai kesehatan reproduksi dan gizi memperburuk kondisi tersebut. Selain itu, masyarakat cenderung menunda pemeriksaan kesehatan dan kurang patuh terhadap pengobatan rutin, terutama pada kasus hipertensi. Sikap tersebut menunjukkan bahwa peningkatan akses layanan belum sepenuhnya diikuti oleh perubahan perilaku kesehatan. Dengan demikian, tantangan yang dihadapi tidak hanya berkaitan dengan penyediaan layanan, tetapi juga perubahan pola pikir dan peningkatan literasi kesehatan masyarakat.

#### ***Hambatan Dari Tenaga Kesehatan***

Hambatan berikutnya berasal dari keterbatasan jumlah tenaga kesehatan dan fasilitas yang tersedia. Kampung Intu Lingau hanya memiliki satu bidan aktif yang melayani jumlah penduduk yang cukup besar, sehingga beban kerja menjadi tinggi dan berdampak pada waktu tunggu serta kualitas pelayanan. Fasilitas Puskesmas Pembantu juga belum dilengkapi dengan peralatan medis yang memadai. Kendala administratif dalam pengadaan alat kesehatan menjadi faktor penghambat, karena kewenangan penyediaan fasilitas berada pada Dinas Kesehatan, sementara dana desa memiliki batasan penggunaan. Kondisi ini menyebabkan tenaga kesehatan harus bekerja dalam keterbatasan sarana dan prasarana.

### ***Hambatan Dari Pemerintah Kampung***

Hambatan internal pemerintah kampung terletak pada keterbatasan kapasitas sumber daya manusia aparatur. Walaupun anggaran tersedia, pelaksanaan program kesehatan belum optimal karena minimnya tenaga yang memiliki kompetensi di bidang kesehatan masyarakat dan edukasi perilaku. Keterbatasan ini berdampak pada belum maksimalnya fungsi sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat. Dengan demikian, hambatan utama bukan terletak pada aspek finansial, melainkan pada kapasitas kelembagaan dan kemampuan aparatur dalam mengelola program kesehatan secara efektif.

### ***Kesimpulan***

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kampung Intu Lingau telah menjalankan peran yang aktif dan strategis dalam pengelolaan pelayanan kesehatan di tingkat kampung. Peran tersebut terlihat melalui penyediaan layanan kesehatan dasar seperti Posyandu, pelaksanaan program pencegahan dan penanganan stunting, serta pengalokasian dana desa yang terarah untuk mendukung kegiatan kesehatan masyarakat. Pemerintah kampung juga menunjukkan komitmen dalam meningkatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu melalui fasilitasi pengurusan BPJS Kesehatan.

Selain aspek penganggaran dan program, pemerintah kampung turut memperkuat pendekatan pemberdayaan masyarakat dengan memberikan insentif kepada kader kesehatan, mendukung operasional Posyandu dan Posbindu, serta menyediakan alat pemeriksaan kesehatan. Perhatian khusus diberikan kepada kelompok rentan seperti lansia dan anak-anak penderita stunting, yang menunjukkan orientasi pelayanan yang inklusif dan berkeadilan sosial. Meskipun, pelaksanaan pelayanan kesehatan masih menghadapi berbagai hambatan. Rendahnya kesadaran masyarakat, praktik pernikahan dini, serta kurangnya kepatuhan terhadap pola hidup sehat menjadi tantangan utama dalam Upaya peningkatan derajat kesehatan.

Di sisi lain, keterbatasan sarana medis dan jumlah tenaga kesehatan juga memengaruhi optimalisasi pelayanan, komitmen yang ditunjukkan pemerintah kampung saat ini sudah memperlihatkan adanya keinginan yang cukup kuat dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Kampung Intu Lingau dan serta seiring dilakukannya peningkatan pelayanan, adapun peran penting yang berkontribusi agar tujuan dan keinginan tersebut tercapai secara maksimal, yaitu dengan dilakukannya penguatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan literasi kesehatan masyarakat, serta kolaborasi yang lebih luas antara pemerintah kampung, tenaga kesehatan, dan masyarakat agar pelayanan kesehatan dapat berjalan secara berkelanjutan dan lebih efektif.

### ***Saran***

Pemerintah kampung perlu meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan. Meskipun gedung pelayanan seperti Puskesmas Pembantu telah tersedia, fasilitas di dalamnya masih sangat minim, seperti tidak adanya tempat tidur pasien. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang lebih dengan Dinas Kesehatan untuk pengadaan fasilitas medis. Penguatan peran dan kapasitas kader kesehatan juga menjadi hal penting. Mengingat keterbatasan tenaga medis yang tersedia, kader posyandu dan lansia menjadi ujung tombak pelayanan di kampung. Pemerintah kampung sebaiknya menyelenggarakan pelatihan rutin bagi para kader serta memberikan insentif yang berbasis pada kinerja guna menjaga motivasi dan profesionalisme mereka. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan dan masih tingginya praktik pernikahan dini menjadi tantangan besar.

Untuk mengatasi hal tersebut, perlu dilakukan penyuluhan dan edukasi yang lebih intensif dan berkelanjutan, dengan melibatkan tokoh adat dan agama agar pesan kesehatan lebih mudah diterima oleh masyarakat. Pengajuan tambahan tenaga kesehatan kepada instansi terkait harus diprioritaskan, serta membuka peluang kerja sama dengan institusi pendidikan kesehatan untuk program magang atau relawan.

### ***Daftar Pustaka***

- Ali, K., & Saputra, A. (2020). TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA TERHADAP PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DI DESA PEMATANG JOHAR. 14, 564–584.
- Benombo, M. K. (2015). Studi Tentang Kualitas Pelayanan Puskesmas Di Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat. 1(3), 237–251.
- Hajar, S., Ali, K., & Saputra, A. (2022). Optimalisasi Pelayanan Publik dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 1(4), 150–155. <https://doi.org/10.59837/jpmba.v1i4.75>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis*.

- Nurisqi, R. F., Winarti, N., & Putra, A. (2024). Efektivitas Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pembantu Kelurahan Penyengat Kecamatan Tanjungpinang Kota. 2(1).
- Ramadhani, A., & Hermana, C. (2023). Strategi Pelayanan Kesehatan Primer Dalam Mencapai Kinerja Program Puskesmas (Studi Kasus Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang Tahun 2022). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9, 102–115.
- Silalahi, V. H. C., Purba, B. K. F., & Sihombing, R. A. (2024). Membangun Kesejahteraan Masyarakat Indonesia Sehat: Strategi Komprehensif Dalam Pencegahan Penyakit, Reformasi Sistem Kesehatan, Dan Peningkatan Kesadaran Isu Kesehatan Mental. 1(3).
- Simbolon, D. S., Sari, J., Purba, Y. Y., Siregar, N. I., Salsabila, R., & Manulang, Y. (2021). PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR. 5(2), 295–302.
- SONDAKH, V., LENGKONG, F. D. ., & PALAR, N. (2023). KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN RAWAT JALAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NOONGAN. *Jurnal Administrasi Publik*, 8, 244–253. 58
- Th. A. Radito. (2014). Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Fasilitas Kesehatan. *Jurnal Ilmu Manajemen*, Volume 11, Nomor 2, April 2014, 11(2), 1–26.

